

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dinamika studi Hubungan Internasional, isu-isu yang semula terbatas pada masalah teknis telah berkembang menjadi lebih luas, tidak hanya mencakup hubungan antar negara dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek seperti interdependensi ekonomi, organisasi internasional, keamanan internasional, rezim internasional, dan juga permasalahan lingkungan hidup.¹ Isu lingkungan hidup adalah salah satu dari banyaknya isu penting yang dibahas dalam studi Hubungan Internasional saat ini.

Perubahan iklim, penipisan flora dan fauna, pemanasan global, dan degradasi lingkungan adalah beberapa contoh permasalahan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Perubahan iklim merujuk pada transformasi yang berlangsung secara bertahap dalam pola cuaca global selama periode yang panjang, dan sering kali berlangsung selama beberapa dekade hingga beberapa abad. Perubahan iklim umumnya ditandai oleh variasi dalam suhu global rata-rata, distribusi presipitasi, insiden cuaca ekstrem, serta pergeseran dalam keseluruhan sistem iklim bumi.² Pemicu utama fenomena perubahan iklim adalah kegiatan manusia yang menyebabkan peningkatan produksi gas-gas yang menyebabkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari berbagai sektor.

¹ Anak Agung Banyu, Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, 2005.

² John Baylis, Steve Smith, "Environmental Issues", *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 8th edition (Oxford: Oxford University Press, 2020), 387.

Emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 193% dari tahun 1990 hingga 2019, mencapai 933 *Metric Tons of Carbon Dioxide Equivalent* (MtCO_{2e}) per-tahun. Sektor energi berperan besar dalam peningkatan ini, menyumbang 59-67% dari total emisi. Di sisi lain, emisi limbah juga meningkat signifikan menjadikannya sumber kedua terbesar, sementara emisi metana meningkat sebesar 180% terutama dari sektor limbah. Meskipun pembakaran bahan bakar terus menjadi pemicu utama emisi GRK, terjadi penurunan kecil pada tahun 2020 karena dampak COVID-19, yang kemudian pulih di tahun 2021. Sektor ketenagalistrikan menjadi kontributor terbesar emisi GRK dengan 43%, diikuti oleh sektor transportasi 25% dan industri 23%.³ Di sektor kehutanan, kontribusi sumber emisi berasal dari kebakaran gambut (peat fire) yang menyumbang sebesar 27,57%, dan dekomposisi gambut (peat decomposition) dengan kontribusi 24,05%. Pada tahun 2021-2022 emisi GRK dari sektor kehutanan mengalami penurunan menjadi 221 MtCO_{2e} yang dimana sumber serapan utama emisi masih berasal dari hutan yang tersisa, yang memberikan kontribusi serapan sebesar 21,45%.⁴ Sehingga sektor kehutanan menjadi sektor yang paling signifikan dalam agenda mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Indonesia telah berupaya memberikan kontribusi penting dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim, terutama di sektor kehutanan. Upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan organisasi internasional, seperti Bank

³ Climate Transparency, "Indonesia Climate Transparency Report: Comparing G20 Climate Action 2022" October 20, 2022, accessed February 22, 2024, <https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2022/10/CT2022-Indonesia-Web.pdf#page=5%20blank>

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV)", 2021, diakses 28 Februari 2024 https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/chart/emisi_forestry_m

Dunia. Salah satu program yang didirikan oleh Bank Dunia untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF). *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) merupakan sebuah kemitraan global antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan juga organisasi masyarakat adat yang tujuan utamanya adalah pada penyusutan emisi dari penghilangan atau pengurangan luas hutan secara besar-besaran (deforestasi) dan penurunan kualitas atau kondisi hutan secara bertahap (degradasi) di negara-negara berkembang.⁵

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara rutin melakukan pengawasan terhadap kondisi hutan dan tingkat deforestasi di keseluruhan wilayah Indonesia setiap tahun. Pemantauan melibatkan pengawasan seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 187 juta hektar, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, dengan menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dalam konteks program Kebijakan Satu Peta (KSP). Proses tersebut didukung oleh data citra satelit landsat yang disediakan oleh Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR-PA), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan dianalisis secara visual oleh tenaga teknis KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut hasil pengawasan tahun 2022, luas total lahan hutan di seluruh Indonesia adalah 96,0 juta hektar atau sekitar 51,2% dari total luas daratan, di mana sebagian besar berada di dalam kawasan hutan. Deforestasi netto Indonesia pada tahun 2021-2022 mencapai 104 ribu hektar, dengan deforestasi terbesar terjadi di hutan sekunder. Dalam perbandingan

⁵ Climate Funds Update, "Forest Carbon Partnership Facility", n.d, diakses 26 Februari 2024, <https://climatefundsupdate.org/the-funds/forest-carbon-partnership-facility/>

dengan hasil pemantauan tahun sebelumnya, terlihat penurunan deforestasi sebesar 8,4% pada tahun 2021-2022.⁶

Indonesia menghadapi peningkatan emisi yang berpengaruh besar terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh praktik pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian besar dan mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang serta prospek pertumbuhan Indonesia. Bank Dunia memberikan dukungan kepada Indonesia dalam berbagai inisiatif untuk mengurangi efek perubahan iklim dan menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan tindakan iklim yang berdampak, terutama di sektor kehutanan.⁷ Dukungan Bank Dunia memberikan dampak yang baik dalam mitigasi perubahan iklim dengan adanya program FCPF tersebut. Dengan demikian, pengurangan emisi karbon inilah yang jadi pendorong Bank Dunia untuk turut serta dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat emisi karbon tertinggi di dunia memegang peranan krusial dalam mitigasi perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bank Dunia telah berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon dengan fokus utama pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta pengurangan

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Pengendalian Deforestasi dan Karhutla di Indonesia”, January 18, 2024, diakses 22 Februari 2024, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7594/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia>

⁷ “Indonesia Sustainable Landscapes Management Program (SLMP)”, *The World Bank*, n.d, diakses 15 Februari 2024, <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-landscapes-management-program/overview>

deforestasi dan degradasi hutan melalui program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) di Indonesia. Melalui implementasi program FCPF, Bank Dunia telah memetakan pencapaian keberhasilan dalam proses pengurangan emisi karbon di sektor kehutanan Indonesia. Dengan demikian, peran Bank Dunia dalam menjalankan program FCPF telah membawa kontribusi yang berarti dalam upaya mitigasi perubahan iklim, khususnya di sektor kehutanan Indonesia. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengidentifikasi peran Bank Dunia dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui FCPF.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana peran Bank Dunia dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF)?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Bank Dunia dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF).

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua :

1. Secara akademik, penelitian ini dapat berkontribusi dalam perkembangan studi Hubungan Internasional terkait isu lingkungan hidup terutama peranan lembaga

keuangan internasional seperti Bank Dunia dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF).

2. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program FCPF dalam mengurangi emisi karbon di Indonesia, sehingga penelitian ini dapat menjadi sumber tambahan referensi tentang mitigasi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka pertama yaitu artikel jurnal yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Mangrove untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Timur” yang ditulis oleh Mimi Salminah dan Iis Alviya.⁸ Artikel ini menjelaskan bagaimana keefektifan kebijakan pengelolaan mangrove untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, baik di tingkat nasional, maupun provinsi, yang dalam hal ini mengambil kasus di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada bagian awal di artikel ini menjelaskan kontribusi hutan mangrove dalam penyerapan karbon dan menjelaskan luas hutan mangrove yang ada di Indonesia, dimana luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 7,7 juta hektar. Dan dari luasan tersebut hanya 30,7% dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, konversi mangrove menjadi tambak ikan dan udang, terutama pada rentang tahun 1997-2005, merupakan penyebab utama kerusakan mangrove di Indonesia. Praktik tersebut menghasilkan pembangunan tambak aktif seluas 0,65 miliar hektar, menyebabkan sekitar 40%

⁸ Mimi Salminah and Iis Alviya, “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Mangrove untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Timur”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. 16, no. 1 (May 2019): 11-29.

luasan mangrove di Indonesia mengalami kerusakan dalam 3 dekade terakhir. Dampaknya, tingkat emisi karbondioksida setara dengan 0,07-0,21 Pg CO₂e per tahun. Pada artikel ini juga dijelaskan bahwasanya Provinsi Kaltim menjadi percontohan program REDD+ untuk mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan sejak 2016. Program ini didanai oleh *Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund* (FCPF-CF) World Bank. Bank Dunia akan memberikan insentif jika Provinsi Kaltim berhasil dalam penyusutan emisinya pada periode 2020-2024, dengan pengelolaan mangrove menjadi salah satu target utamanya.

Artikel ini menjadi rujukan untuk melihat bagaimana peranan Bank dunia dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan diteliti memiliki fokus yang berbeda dimana artikel ini fokus membahas mengevaluasi langkah-langkah pemerintah setempat dalam menjaga kelestarian mangrove sebagai strategi mitigasi perubahan iklim, termasuk analisis implementasi kebijakan, sedangkan peneliti fokus membahas tentang kontribusi Bank Dunia dalam menyediakan pendanaan dan dukungan bagi inisiatif mitigasi perubahan iklim di Indonesia, terutama dalam mengurangi deforestasi dan peningkatan kapasitas lokal.

Artikel selanjutnya yang berjudul “Challenges to and Strategies for the Climate Village Program Plus: A Lesson Learned from Indonesia” yang ditulis oleh Catur Budi Wiati, I Wayan Susi Dharmawan, Niken Sakuntaladewi, Sulistya Ekawati, Tien Wahyuni, Rizki Maharani, Yayan Hadiyan, Yosua Naibaho, Wahyudi

Iman Satria, Ngatiman, Abdurachman, Karmilasanti, Aulia Nur Laksmita, Eddy Mangopo Angi and Chiranjeeewee Khadka.⁹

Artikel ini menjelaskan tentang *The LongTerm Strategy on Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050 telah dikembangkan untuk mendukung transparansi nasional yang terpadu mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dimana LTS-LCCR 205 mencakup 83.820 desa, dan 3.270 desa diantaranya telah terdaftar dalam program *Climate Village Program* (CVP) pada tahun 2021. CVP merupakan salah satu program unggulan nasional Kementerian yang berbasis masyarakat sejak tahun 2016. CVP ini bertujuan untuk mengarusutamakan isu global perubahan iklim agar dapat direspon secara kolektif terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi di tingkat lokasi lokal. Oleh karena itu, CVP plus diluncurkan dengan sokongan multilateral dari *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF). Kalimantan Timur memiliki luas 12,7 juta hektar, dimana 6,5 juta hektar (54%) diantaranya adalah hutan dan telah dipilih sebagai lokasi pilot project FCPF-CF sejak tahun 2015.

Artikel ini menjadi rujukan untuk melihat bagaimana peranan Bank dunia dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Pada artikel ini berfokus pada tantangan dan strategi implementasi program CVP Plus di tingkat desa. Berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis dimana berfokus terhadap evaluasi kinerja dan dampak

⁹ Catur Budi Wiati, I Wayan Susi Dharmawan, Niken Sakuntaladewi, Sulistya Ekawati, Tien Wahyuni, Rizki Maharani, Yayan Hadiyan, Yosua Naibaho, Wahyudi Iman Satria, Ngatiman, Abdurachman, Karmilasanti, Aulia Nur Laksmita, Eddy Mangopo Angi and Chiranjeeewee Khadka, "Challenges to and Strategies for the Climate Village Program Plus: A Lesson Learned from Indonesia", *Sustainability*, vol. 14, no. 9 (May 2022): 5530

program FCPF di Indonesia, termasuk analisis efektivitas penggunaan dana dan dukungan kelembagaan terhadap perubahan iklim di Indonesia.

Artikel jurnal ketiga berjudul “Regulation on the Utilization of Carbon Service as a Forest Protection Effort in Indonesia” yang ditulis oleh Abdhy Walid Siagian, Syofiarti, and Anton Rosari.¹⁰ Artikel ini menjelaskan gagasan mengenai pengaruh hak asasi manusia dimana hak yang melekat pada setiap individu untuk menjalani kehidupan yang makmur dan sejahtera, perolehan habitat yang layak dan menyehatkan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Di Indonesia, ide tentang pengaruh hak asasi manusia dan demokrasi ekonomi tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tertentu menegaskan hak individu untuk kehidupan yang sejahtera dan hak atas lingkungan yang bersih. Namun, tantangan perubahan iklim mengancam integritas konstitusi yang berbasis lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini melalui regulasi dan kebijakan. Di antara langkah-langkahnya adalah melalui peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertanggung jawab atas strategi pengelolaan perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui berbagai program, seperti program FCPF. Program FCPF, mendorong peningkatan kapasitas dan pendanaan dalam mempersiapkan infrastruktur untuk implementasi REDD+.

¹⁰ Abdhy Walid Siagian, Syofiarti, and Anton Rosari, “Regulation on the Utilization of Carbon Service as a Forest Protection Effort in Indonesia”, *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, vol. 4, no. 3 (December 2023): 299-317

Artikel ini menjadi rujukan untuk melihat bagaimana peranan Bank dunia dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Pada artikel ini menjelaskan tentang implementasi peraturan yang berkaitan dengan aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam perlindungan hutan, berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis dimana lebih terfokus tentang evaluasi kinerja program FCPF dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, serta peningkatan kapasitas lokal dalam hal mitigasi perubahan iklim.

Berikutnya artikel keempat berjudul “Max Weber in the tropics: How global climate politics facilitates the bureaucratization of forestry in Indonesia” yang ditulis oleh Markus Lederer and Chris Höhne.¹¹ Artikel ini diamati dari pengamatan Max Weber bahwa inti kelembagaan modernisasi dan negara modern adalah pembentukan birokrasi legal-rasional, yang berpotensi memberikan hasil yang efektif dan sah dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) adalah salah satu pengaturan tata kelola iklim global yang paling maju dan menunjukkan bahwa hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas otonom dan prosedur yang dapat diandalkan di wilayah-wilayah yang wilayah kekuasaannya terbatas. Dampak yang sebagian tidak disengaja ini dapat dikonseptualisasikan sebagai meningkatnya birokratisasi rasional-legal, yang dimulai melalui aktor-aktor eksternal dan domestik. Dalam jurnal ini juga menjelaskan birokrasi jenis baru yang semakin menguat di sektor kehutanan Indonesia meskipun masih terdapat pola neopatrimonialisme, juga menjelaskan

¹¹ Markus Lederer, Chris Höhne, “Max Weber in the tropics: How global climate politics facilitates the bureaucratization of forestry in Indonesia”, *Regulation & Governance*, vol. 15, no. 1 (2021): 133-151

munculnya tanda-tanda pendekatan pengelolaan publik yang baru, dan semakin menguatnya fungsi setara seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia juga mulai menjalin hubungan dengan donor REDD+ multilateral seperti FCPF, FIP, dan UN-REDD. Menyusul keputusan yang dibuat mengenai standar terkait REDD+ di dalam UNFCCC, para pendonor ini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memajukan birokratisasi Weberian seiring dengan peningkatan kapasitas otonomi dan diperkenalkannya prosedur yang dapat diandalkan.

Artikel ini menjadi rujukan untuk melihat bagaimana peranan Bank dunia dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Pada jurnal ini menyoroti dinamika birokratisasi dalam konteks hutan di Indonesia, memperhatikan bagaimana birokratisasi kehutanan di Indonesia berkembang dalam kerangka politik dan ekonomi lokal, dan menyoroti interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam. Berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis dimana mengeksplorasi bagaimana lembaga internasional seperti Bank Dunia memberikan pendanaan, bimbingan teknis, dan dukungan kelembagaan bagi inisiatif mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui FCPF. Dalam hal ini, politik iklim global memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama antar negara dan lembaga internasional untuk pengurangan emisi karbon dan mengelola hutan secara berkelanjutan sebagai bagian dari solusi untuk perubahan iklim global.

Studi pustaka terakhir yaitu artikel jurnal yang berjudul “Policies affecting the implementation of REDD+ in Indonesia (cases in Papua, Riau and Central

Kalimantan)” yang ditulis oleh Sulistya Ekawati, Subarudi, Kushartati Budiningsih, Galih Kartika Sari, and Muhammad Zahrul Muttaqin.¹² Artikel ini menjelaskan efektivitas kebijakan terkait REDD+ baik di sektor kehutanan maupun non kehutanan pada tingkat nasional dan sub-nasional di Indonesia. Efektivitasnya tergantung pada tingkat kemauan politik di kementerian sektoral. Efektivitas memerlukan legitimasi atau penerimaan politik. Dalam penelitian ini, kemauan politik dilihat dari ketersediaan regulasi dan dokumen (STARNAS, MRV dan FREL). Analisis kesenjangan diterapkan dengan membandingkan kebijakan dan implementasinya pada setiap elemen REDD+. Selain itu juga menganalisis kesiapan REDD+ di tingkat nasional dan subnasional. Artikel ini juga membahas struktur kebijakan REDD+ dengan menjelaskan peraturan nasional dan daerah yang mendukung atau menghambat implementasi REDD+. Kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang dapat mengurangi emisi. Analisis kemajuan REDD di tingkat sub-nasional mengambil kasus di tiga provinsi di Indonesia. Kemudian membahas tentang perilaku para aktor di tingkat nasional dan subnasional dalam implementasi REDD+. Indonesia mengubah gagasan awal REDD+ sebagai instrumen berbasis pasar menjadi instrumen yang didanai pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan manfaat non-moneter semakin banyak diangkat dalam wacana REDD+. Meski belum ada kepastian mengenai insentif REDD+, Provinsi Kalimantan Timur dipilih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai lokasi sampel Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund REDD+. Jika hal ini

¹² Sulistya Ekawati, Subarudi, Kushartati Budiningsih, Galih Kartika Sari, Muhammad Zahrul Muttaqin, “Policies affecting the implementation of REDD+ in Indonesia (cases in Papua, Riau and Central Kalimantan)”, *Forest Policy and Economics*, 108 (2019): 101939

berhasil, Kalimantan Timur akan menjadi provinsi pertama yang menerima pembayaran dana karbon.

Artikel ini dapat menjadi rujukan untuk melihat bagaimana peranan Bank dunia dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Pada artikel ini memperhatikan bagaimana berbagai kebijakan, baik di tingkat nasional maupun lokal, memengaruhi implementasi REDD+ dan dampaknya terhadap upaya mitigasi perubahan iklim di wilayah Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah. Berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis dimana lebih berorientasi pada evaluasi kinerja dan kontribusi Bank Dunia dalam skala nasional melalui program FCPF.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Organisasi Internasional

Negara masih mempertahankan perannya sebagai unit politik utama dalam urusan internasional, namun perkembangan dinamika hubungan internasional menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam munculnya aktor-aktor di luar ranah negara, serta meningkatnya kompleksitas hubungan interdependensi dan transnasional. Hal ini menyebabkan negara menjadi lebih rentan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan. Dengan fenomena seperti ini, negara tidak lagi merupakan satu-satunya aktor yang dominan dalam arena hubungan internasional.¹³

¹³ Sugito, *Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Phinisi Press Yogyakarta, 2016), 8

Organisasi internasional adalah hasil dari kerjasama yang terstruktur dengan tujuan yang jelas, didukung oleh struktur organisasi yang kompeten untuk mengatasi berbagai masalah di dunia internasional. Dalam praktiknya, konsep ini juga mencakup kerjasama institusional yang efektif dengan aktor non-negara lainnya. Tentu saja, izin dari semua pihak terkait diperlukan untuk merumuskan pola kerjasama yang akan dilaksanakan.¹⁴

Organisasi internasional memiliki ciri khas yang menjadi bagian penting dari identitasnya. Organisasi internasional dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama yaitu keanggotaan, struktur, dan tujuan.¹⁵ Organisasi internasional juga memiliki beberapa karakteristik yaitu termasuk keberadaan lembaga yang berkelanjutan untuk melaksanakan fungsi-fungsi berkesinambungan, keanggotaan yang bersifat sukarela dari individu atau entitas yang memenuhi syarat, penerimaan dan implementasi dokumen dasar yang mengatur tujuan, struktur, dan metode operasional, adanya lembaga yang mewakili organisasi tersebut, serta keberadaan sekretariat permanen yang bertugas mengelola fungsi administratif, penelitian, dan penyediaan informasi secara berkelanjutan.¹⁶

Dalam konteks hubungan internasional, organisasi memegang peran penting dalam penyelesaian berbagai masalah yang timbul di suatu negara. Keberadaan organisasi juga mencerminkan kebutuhan akan kerjasama dengan aktor lain. Menurut

¹⁴ Clive Archer, *International Organizations: Third Edition*, (New York: Routledge, 2001), 1

¹⁵ Clive Archer, *International Organizations: Third Edition*, 33

¹⁶ A. LeRoy Bennett, *International Organizations Principles & Issues 5th Edition* (United States of America: Prentice Hall, Inc, 1991), 2

Clive Archer, organisasi internasional memiliki tiga peran, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor:¹⁷

1. Instrumen

Clive Archer menyatakan bahwa organisasi internasional adalah sebuah alat atau sarana yang bisa dimanfaatkan oleh anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu dengan menyelaraskan tindakan para anggotanya demi mencapai tujuan tersebut. Selain itu, organisasi internasional juga dapat berfungsi sebagai alat untuk meredam intensitas konflik yang terjadi dalam sistem internasional. Namun, seringkali anggota dengan kekuatan besar bersaing untuk memanfaatkan organisasi internasional, yang secara langsung akan membatasi tindakan dan pergerakan organisasi internasional tersebut.

2. Arena

Clive Archer menjelaskan bahwa dalam organisasi internasional, arena yang dimaksud adalah peran organisasi tersebut dalam menyelenggarakan forum yang dihadiri oleh negara anggota atau aktor lainnya untuk membahas isu tertentu. Hasil dari forum ini bisa berupa konvensi, perjanjian, atau persetujuan. Organisasi internasional menyediakan forum netral di mana anggota dapat berargumentasi, bekerja sama, atau bermain peran. Forum ini bersifat inklusif, dengan keanggotaan dan kebijakan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pihak. Selain itu, organisasi internasional berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara negara anggota dan aktor

¹⁷ Teuku May Rudy, *Administrasi & Organisasi Internasional* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 29

lainnya. Dalam perannya, organisasi internasional seringkali menjalankan dua fungsi sekaligus: menyediakan sarana kerjasama antar negara dan aktor non-negara, serta berfungsi sebagai instrumen bagi negara anggotanya, sesuai dengan peran utamanya.

3. Aktor

Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional bisa berperan sebagai aktor independen, bertindak tanpa intervensi atau arahan dari pihak manapun. Meskipun beberapa organisasi internasional lebih cenderung bergantung pada anggotanya dan hanya mencerminkan tujuan kolektif mereka sebagai alat untuk merealisasikan tujuan tersebut di tingkat internasional, organisasi internasional juga mampu bertindak sebagai perintis dalam pembuatan kebijakan yang akan diterapkan oleh negara. Hal ini mendorong negara-negara untuk bertindak sesuai dengan tujuan organisasi internasional. Sebagai aktor, organisasi internasional dapat bertindak secara mandiri terhadap negara anggota atau aktor lainnya. Menurut Clive Archer, identitas organisasi internasional sebagai aktor independen memungkinkan mereka mengambil tindakan mandiri, menunjukkan perannya sebagai aktor dalam dunia politik.

Menurut Clive Archer, dalam perannya, organisasi internasional memiliki fungsi-fungsi berikut ini:¹⁸

1. Artikulasi dan Agregasi

Organisasi internasional berperan dalam mengatur alokasi nilai-nilai dan sumber daya melalui proses perbincangan dan kesepakatan antara anggota. Mereka

¹⁸ Clive Archer, *International Organizations: Third Edition*, 98-108.

bertindak sebagai alat bagi negara untuk menyuarakan dan menggabungkan kepentingan mereka. Sebagai institusi dalam sistem internasional, organisasi internasional juga menjadi peserta aktif dalam forum diskusi dan negosiasi.

2. Norma

Organisasi internasional memiliki peran dalam memfasilitasi pembentukan norma dalam sistem internasional. Norma-norma ini bagian penting dalam mengatur perilaku dalam setiap tindakan. Dengan adanya norma-norma ini, sistem internasional menjadi lebih tertata dan terstruktur, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan tidak melanggar atau melampaui batas yang telah ditetapkan.

3. Recrutmen

Organisasi internasional mempunyai peran yang signifikan dalam merekrut partisipan untuk sistem politik internasional. Organisasi memiliki kekuatan untuk memilih negara atau organisasi lain yang dapat memberikan kontribusi dalam dinamika politik global.

4. Sosialisasi

Organisasi internasional berperan dalam mengedukasi dan mendesak anggotanya untuk bekerja secara kolaboratif dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Proses ini melibatkan negara-negara dalam forum internasional atau melalui perwakilan mereka sendiri. Sosialisasi ini memiliki peran kunci dalam mempertahankan norma-norma yang ada dan membantu mengkomunikasikan tujuan-tujuan yang harus diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dicapai.

5. Pembuat Peraturan

Peran pembuat aturan dalam organisasi internasional memiliki perbedaan dengan sistem politik domestik, di mana dalam konteks politik domestik terdapat lembaga-lembaga formal seperti pemerintah atau parlemen yang bertugas membuat aturan-aturan. Dalam organisasi internasional, pembuatan aturan lebih mengacu pada sumber-sumber peraturan yang telah ada, seperti praktik yang sudah berlangsung, pengaturan yang diselenggarakan secara khusus, atau perjanjian hukum bilateral antara negara-negara atau organisasi internasional.

6. Pelaksanaan Peraturan

Selain bertugas sebagai pembuat peraturan, organisasi internasional juga memiliki fungsi untuk menjalankan peraturan tersebut, dengan implementasi peraturan diberikan kepada kedaulatan negara-negara untuk melaksanakannya. Aturan yang telah ditetapkan, seperti yang termuat dalam konvensi, harus dihormati sesuai dengan kesepakatan perjanjian dan berlaku secara universal.

7. Pengesahan Peraturan

Organisasi internasional memiliki peran dalam mengadopsi aturan yang berlaku di lingkup internasional. Organisasi internasional juga memiliki tanggung jawab dalam menyetujui aturan tersebut, yang melibatkan kerjasama dengan organisasi lain dan negara-negara tertentu.

8. Informasi

Dalam politik internasional, organisasi internasional berperan dalam menyampaikan ide dan gagasan melalui berbagai saluran informasi. Selain melalui pemerintah negara, informasi juga disebarkan melalui media komunikasi yang

semakin luas, mempermudah penyebaran informasi. Organisasi internasional juga memanfaatkan dan mengembangkan situs web sebagai sarana informasi tersebut. Sebagai contoh, Bank Dunia memiliki situs web khusus yang mencakup berbagai aspek tentang Bank Dunia dan situs khusus untuk Bank Dunia di negara-negara seperti Indonesia.

9. Operasional

Seperti yang terjadi dalam pemerintahan suatu negara, fungsi operasional organisasi internasional dijalankan melalui penerapan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai entitas formal yang berkelanjutan, didirikan melalui perjanjian antara anggota, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, dari dua atau lebih negara berdaulat, dengan maksud untuk menggapai kepentingan bersama dari keanggotaannya. Dalam konteks ini, fungsi organisasi internasional adalah untuk melaksanakan tindakan yang didasarkan pada perjanjian antara anggotanya.

Bank Dunia adalah organisasi pembangunan internasional yang dimiliki oleh 187 negara. Peran Bank Dunia adalah untuk meminimalkan kemiskinan dengan memberikan pinjaman uang kepada pemerintah negara-negara anggotanya yang miskin untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya.¹⁹ Bank dunia sebagai sebuah entitas juga memusatkan perhatian pada isu-isu yang timbul di tingkat internasional dan melibatkan negara-negara yang terlibat dengan ide dan gagasan dalam menangani masalah tersebut. Oleh karena itu,

¹⁹ The World Bank, "About The World Bank", n.d, diakses 18 April 2024 <https://www.worldbank.org/en/about>

penggunaan konsep organisasi internasional dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan fungsi Bank Dunia sebagai organisasi internasional dalam menanggapi fenomena global. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Bank Dunia berperan dan memberikan kontribusi dalam merespons isu-isu global terutama isu lingkungan hidup.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak bisa diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya. Straus dan Corbin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat diterapkan untuk menyelidiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menerapkan analisis dengan pendekatan induktif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sosial dengan merujuk pada kondisi realitas atau situasi natural yang holistik, kompleks, dan terperinci.

Penelitian yang mengadopsi pendekatan induktif dengan tujuan mengembangkan konstruksi teori atau hipotesis melalui pemaparan fakta disebut

sebagai penelitian yang menerapkan paradigma kualitatif.²⁰ Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis, di mana fenomena yang diamati dianalisis dengan mendalami aspek-aspek fenomena yang dipilih lebih lanjut oleh peneliti.

1.8.2 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis berfokus pada peran Bank Dunia dan evaluasi efektivitas program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) dalam mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Dalam menetapkan batasan kurun waktu penelitian, yakni dari pertama kali program FCPF dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2015 yang dimana dimulainya persiapan pemenuhan persyaratan dan sebagai batas akhir penelitian pada tahun 2022 berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam penelitian.

1.8.3 Unit Analisa dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah entitas atau elemen yang akan dipelajari, dijelaskan, atau diprediksi perilakunya. Unit analisis juga dikenal sebagai variabel dependen atau terikat.²¹ Unit analisis dalam penelitian ini adalah peranan Bank dunia dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Sedangkan unit eksplanasi dalam penelitian adalah unit yang memiliki dampak pada unit analisis yang ingin diamati, juga dikenal sebagai variabel independen. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan

²⁰ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”: Yogyakarta Press, 2020), 19

²¹ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (LP3ES, 1990), 39

program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF). Tingkat analisis adalah tingkatan dari objek yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, level analisisnya adalah tingkat negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Studi pustaka merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait isu yang sedang diteliti melalui referensi seperti buku, dokumen, arsip, atau literatur yang relevan dengan isu tersebut yang tersedia di perpustakaan.²² Hal tersebut disebabkan karena penelitian ini berfokus pada peran sebuah organisasi internasional dalam konteks isu lingkungan hidup dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap data yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan. Peneliti menggunakan data dan informasi yang bersifat sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain, seperti laporan, profil, buku pedoman, atau referensi pustaka. Selanjutnya, peneliti juga melakukan pengelompokan data dari situs web Bank Dunia (<https://www.worldbank.org/>) serta situs web program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) (<https://www.forestcarbonpartnership.org/>) yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Sumber lain yang digunakan termasuk situs web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (<https://www.menlhk.go.id/>) dan beberapa referensi dari

²² Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (LP3ES, 1990), 40

penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, guna mencari jawaban terhadap permasalahan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi yang detail dan mendalam mengenai situasi atau konteks yang alami, menyoroti gambaran yang sesungguhnya dari apa yang terjadi dan bagaimana adanya. Data yang digunakan dalam analisis ini tidak berupa angka atau data numerik, melainkan berupa data yang telah dipilih secara cermat dari berbagai sumber yang relevan, yang kemudian diolah dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan karakteristik dan detail dari fenomena yang diamati.²³

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, penulis menerapkan teknik analisis untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan peranan Bank Dunia dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui program *Forest Carbon Partnership Facility*. Peneliti pertama-tama mengumpulkan data terkait topik tersebut, kemudian menyortir dan memilah data tersebut. Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan kerangka konseptual yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah proses analisis selesai, data yang telah dipersiapkan akan dirangkum dan disajikan dalam bentuk laporan akhir.

²³ Farida Nugharani, *Metode Pendidikan Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*, 1st ed. (Surakarta: Cakra Book, 2014).

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mengulas tentang pengenalan latar belakang penelitian, merumuskan permasalahan, menetapkan pertanyaan penelitian, menjelaskan kerangka konseptual yang diterapkan, metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, batasan penelitian, tingkat dan unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data, serta pengaturan sistematika penulisan.

BAB II BANK DUNIA DAN KEBERADAANNYA DI INDONESIA

Bagian ini menguraikan informasi tentang Bank Dunia. Bab ini merinci sejarah, prinsip, pendanaan, dan peran Bank Dunia dalam menghadapi perubahan iklim global sebagai organisasi internasional. Selain itu, bagian ini akan menyoroti kehadiran Bank Dunia di Indonesia beserta beragam kegiatan yang dilakukannya di negara Indonesia secara umum.

BAB III PERUBAHAN IKLIM DAN PROGRAM FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY (FCPF) DI INDONESIA

Bagian ini memaparkan situasi iklim dan evolusi iklim di Indonesia, serta menguraikan perubahan iklim yang tengah terjadi di negara Indonesia. Selain itu, dibahas pula faktor-faktor yang memicu perubahan iklim beserta konsekuensinya. Bab ini juga akan mengulas program dari Bank Dunia yaitu *Forest Carbon Partnership Facility* dalam masalah perubahan iklim di Indonesia dan berbagai langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perubahan iklim.

BAB IV PERAN BANK DUNIA DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA MELALUI PROGRAM FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY (FCPF)

Bagian ini akan menguraikan analisis terhadap peranan Bank Dunia dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui program FCPF. Bab ini akan mengevaluasi tindakan dan pencapaian Bank Dunia di Indonesia terkait dengan isu perubahan iklim. Selain itu, bab ini akan melakukan analisis terhadap kontribusi Bank Dunia tersebut dengan menggunakan kerangka konsep dalam bidang Hubungan Internasional.

BAB V KESIMPULAN

Bagian ini berisi ringkasan penelitian yang disusun oleh penulis berdasarkan informasi yang telah disajikan di bab-bab sebelumnya secara ringkas dan juga mencakup saran mengenai penelitian ini.

